

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN

PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD

**BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

Pembangunan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan, didanai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak & retribusi), Dana Perimbangan (transfer dari pusat), dan Pendapatan Lain-lain yang Sah, serta ditopang oleh pembiayaan (pinjaman daerah, dll.) untuk mendanai program prioritas seperti infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga daerah. APBD menampung seluruh hak pemerintah daerah dalam memungut dan memperoleh pendapatan daerah. APBD berisi program belanja pemerintah untuk memenuhi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, menjalankan fungsi pemerintahan, serta membiayai seluruh kewajiban pemerintah daerah dimana kebijakan, program kerja, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintahan tertuang dalam APBD.

Dasar Hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Dalam hal melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan alamat <https://sipp.kepriprov.go.id/app/auth/login>. Aplikasi ini menyediakan data besaran pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisik seluruh rekening belanja yang ada. Aplikasi ini menggunakan konsultan dan sewa hosting dari PT. Global Intermedia di Yogyakarta. Kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala dimana untuk realisasi keuangan data diimport dari SIPD ke SIPPD sedangkan pelaporan realisasi fisik dientri oleh seluruh admin OPD setiap bulannya.

Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh OPD menetapkan target keuangan dan fisik bulanan;
2. Konsultan menarik besaran pagu belanja dari SIPD RI ke SIPPD;
3. Seluruh OPD melakukan pemaketan kegiatan pada aplikasi SIPPD;
4. Mengumpulkan data kegiatan strategis daerah dan menandainya di aplikasi SIPPD;
5. Konsultan melakukan import data realisasi keuangan dari SIPD RI ke SIPPD;
6. Seluruh admin OPD melakukan entri data realisasi fisik belanja ke aplikasi SIPPD setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. OPD pelaksana kegiatan strategis daerah melakukan entri dokumentasi atas pelaksanaan progres kegiatan ke aplikasi SIPPD;
8. Biro Perekonomian dan Pembangunan menyusun bahan rapat evaluasi.

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, pelaksanaan pemerintahan tidak terlepas dari penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah. Pelaporan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada beberapa tahun ini semakin diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga hingga Kepala Daerah.

Dengan adanya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 445 Tahun 2023 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau, Biro Perekonomian dan Pembangunan selaku Sekretaris Tim P3DN Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas terkait sekretariat pelaksanaan P3DN di Provinsi Kepulauan Riau.

II. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan administrasi pengendalian pembangunan dalam aplikasi SIPPD, dan melakukan pengendalian realisasi belanja produk dalam negeri.

b. Tujuan

- Memberikan pembinaan pelaporan realisasi, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pembangunan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan kedepan.

- Meningkatkan sistem pelaporan aplikasi SIPPD yang real time dan akuntabel, serta pelaporan realisasi belanja PDN yang tepat waktu setiap bulan.

III. Program dan Capaian Program

Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD merupakan kegiatan yang mendukung Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini adalah:

- Laporan realisasi keuangan dan fisik bulanan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- Laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2026.
- SK Panitia Pelaksana dan Tim Pengolah Data Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun 2026.
- SK Panitia Pelaksana dan Tim Pengolah Data Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

IV. Hasil dan Keluaran (Output)

- Laporan Bulanan Realisasi Keuangan dan Fisik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Laporan Bulanan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

V. Manfaat dan Dampak

Manfaat dilaksanakannya Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD adalah meningkatnya persentase pemulihan ekonomi daerah dan meningkatnya persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD sesuai target serta penyerapan belanja produk dalam negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, dampak dari kegiatan ini adalah persentase ketepatan waktu dan kesesuaian realisasi dengan target serapan fisik dan keuangan kegiatan APBD se-Provinsi Kepulauan Riau.

VI. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan di Kota Tanjungpinang.

VII. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Persiapan, meliputi

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;

b. Pelaksanaan, meliputi

- 1) Pemaketan Kegiatan pada Aplikasi SIPPD Tahun 2026;
- 2) Penetapan SK Target Keuangan dan Fisik OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- 3) Penetapan SK Panitia Pelaksana dan Tim Pengolah Data Laporan Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- 4) Penetapan SK Panitia Pelaksana dan Tim Pengolah Data Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

c. Evaluasi, meliputi

- 1) Bahan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setiap minggu;
- 2) Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan Tahun 2026;
- 3) Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri bulanan Tahun 2026.

VIII. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ini dialokasikan dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp. 65.829.000,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

NO REKENING	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	479.000,-
5.1.02.01.001.00063	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	41.300.000,-
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.050.000,-
TOTAL		65.829.000,-

IX. Organisasi Pengguna Barang/Jasa

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dikoordinir oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan dengan struktur pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. H. Zulhendri, M.Si.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan : Isra Gigantara, S.Sos., M.Si.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Reni Sulistriani, A.Md.

X. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

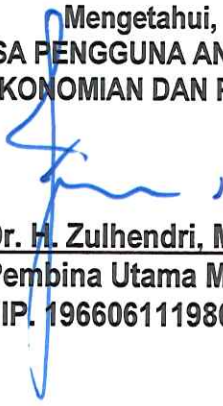
NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Penetapan TOR/KAK, SK Kegiatan APBD, SK Admin SIPPD, SK Target												
2	Rapat Pemaketan Kegiatan SIPPD												
3	Koordinasi ke Konsultan SIPPD PT. Global Intermedia di Yogyakarta												
4	Perpanjangan Kontrak Hosting SIPPD												
5	Pengentrian data realisasi keuangan dan fisik pada aplikasi SIPPD												
6	Laporan P3DN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri												
7	Pembuatan SPJ Kegiatan												
8	Pembuatan Laporan Akhir kegiatan												

XI. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ini dibuat untuk dapat dipedomani dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan perubahan baik waktu maupun penganggaran dana kegiatannya terimakasih.

Tanjungpinang, Desember 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


Dr. H. Zulhendri, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196606111986021004

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Isra Gigantara, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19720905 200212 1 007